

## ABSTRAK

**Gde Ancana, Tesis “Karakteristik Tindak Pidana Pemilu Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya”** Penelitian ini berfokus Melihat dampak dari pelanggaran pemilu yang begitu luas, maka sebenarnya pelanggaran pemilu bukanlah kategori atau tipe kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa. Undang-undang Pemilu legislatif telah memuat rumusan delik dan ancaman pidana terhadap pelanggaran pemilu, termasuk juga mekanisme di dalam penyelesaiannya. Dalam kajian teoritik untuk dapat dipidananya seseorang adalah sangat terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Fokus pembahasan pada legal issue yaitu bagaimana karakteristik Tindak Pidana Pemilu, dan Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelakunya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian *juridic normatif* dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka hukum nasional Indonesia sendiri. Serta menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, peneliti mengklasifikasikan karakteristik Tindak Pidana Pemilu berdasarkan **Jenis Tindak Pidananya** yang merupakan tindak pidana khusus yang memiliki spesifikasi berbeda dalam KUHP. Perbuatan yang dilarang, meliputi :pelanggaran berkaitan dengan kampanye, sebelum dan selama kampanye, berkaitan dengan penghitungan suara dan atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat. Berdasarkan **Modus Operandinya** yang terdiri dari Beli suara (*vote buying*), Beli kursi (*candidacy buying*), Manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu (*electoral administrative corruption*) dan Dana kampanye yang ‘mengikat’ (*abusive donation*) **Berdasarkan Jenis Perbuatan Pidana** dalam Undang-undang Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) diatur dalam Pasal 488 s.d Pasal 554 Undang-Undang Pemilihan Umum 2017. **Berdasarkan Sanksi Pidana**, Sistem sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu bersifat kumulatif yaitu penggabungan sanksi pidana penjara dan denda sekaligus dikenakan kepada pelaku. Hal ini menyimpang dari sistem pidanaan dalam KUHP Pasal 10, karena dalam KUHP, pidana pokok hanya dapat dijatuhkan satu jenis pidana pokok saja, tidak boleh antara jenis-jenis pidana pokok dijatuhkan secara bersama-sama. **Berdasarkan Subjek Hukum** yang terdiri dari Setiap Orang Maupun Badan Hukum/Korporasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu didasarkan terpenuhinya unsure perbuatan yang dilarang dan adanya unsur kesalahan yang berupa kesengajaan dalam kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana pemilu.

Kata Kunci : Karakteristik, Tindak Pidana Pemilihan Umum, Pertanggungjawaban Pidana.

**ABSTRACT**

**Gde Ancana, Thesis "Characteristics of Election Criminal Acts and Criminal Liability of the Perpetrators"** This research focuses on looking at the impact of electoral violations that are so broad, in fact election violations are not a category or type of ordinary crime, but extraordinary crimes. The legislative election law contains the formulation of offenses and criminal threats against election violations, including the mechanism in its resolution. In a theoretical study for the conviction of a person is closely related to criminal liability. The focus of discussion on the legal issue is how the characteristics of Election Crimes, and How the criminal liability is the culprit.

The research method used in the study is normative juridical research with the consideration that the starting point of the study is an analysis of the laws and regulations within the Indonesian national legal framework itself. And use the statutory approach, conceptual approach, and case approach. Legal materials obtained from the process of inventorying primary legal materials namely legislation relevant to legal issues are carried out by examining the official website of the Director General of legislation. The next step is to trace secondary legal material through studies that are relevant to the topic of the problem which is then processed and analyzed according to the rules of legal research to get answers to legal issues raised.

The results showed that election criminal acts have different characteristics from criminal offenses in general, researchers classify the characteristics of election criminal acts based on the types of criminal acts which are specific criminal acts that have different specifications in the Criminal Code. Prohibited acts include: violations related to the campaign, before and during the campaign, relating to the vote count and or institutions that do the quick count and announce the results of the fast count. Based on the Operational Mode which consists of buying votes, buying seats (candidacy buying), manipulation in the stages and electoral administrative corruption process and 'abusive donation' funds based on types of criminal acts in the law Acts that can be classified as general election (Election) criminal acts are regulated in Article 488 to Article 554 of the 2017 General Election Law. Based on Criminal Sanctions, the system of criminal sanctions in electoral offenses is cumulative, namely the incorporation of imprisonment and fines at the same time imposed to the perpetrators. This deviates from the criminal system in the Criminal Code Article 10, because in the Criminal Code, the main criminal code can only be imposed with one main type of criminal matter, not between the types of main criminal code handed down together. Based on Legal Subjects consisting of Every Person And Legal Entity / Corporation. Criminal liability towards perpetrators of election crimes is based on the fulfillment of prohibited acts and the existence of an element of error in the form of intent in the defendant's ability to be responsible, there is no forgiving reason for the perpetrators of election crimes.

**Keywords: Characteristics, General Election Crime, Criminal Liability.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widi Was atas asung kerta wara nugrahanya dan karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Karakteristik Tindak Pidana Pemilu dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya**”.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan penulisan Tesis diantaranya:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta para Wakil Dekan.
2. Bapak DR.Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., yang telah membimbing penulis dengan sangat baik dan segala keterbatasannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
3. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D, Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku tim penguji.
4. Ibu DWI RAHAYU KRISTIANTI, S.H., M.A, selaku dosen wali yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Keluarga yaitu Papa, Mama, Istriku Sri Rahayu Lakhsmie, SE, Adikku Bagus Ardiana, SE dan Nyoman Indra Juarsa, SH.,MH dan segenap keluarga besar, yang selama ini telah membimbing, memberi dukungan dan selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasan, juga para pegawai khususnya Pak Tubi yang membantu urusan administratif selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Bapak Saiful Bahri Siregar, SH.,MH, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang sudah memberikan ijin, kesempatan dan semangatnya kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Unair

8. Para Senior dan teman-teman Jaksa yang bersama-sama menempuh pendidikan S2 di Fakultas Hukum Unair yang selama ini membantu penulis dalam perkuliahan dan menjalankan berbagai aktifitas kampus.
9. Para Rekan-rekan Kasi, Jaksa Fungsional, Staf Tata Usaha dan Pegawai lingkup Kejaksaan Negeri Konawe yang sudah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Unair.

Tidak lupa diucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu , atas segala doa dan kerjasamanya dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu sangat diharapkan masukan dari para pembaca berupa kritik dan saran yang membangun agar menjadi perbaikan di masa akan datang. Penulis juga berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Surabaya, 5 Mei 2020

GDE ANCANA

**DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.